

## **Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam**

**Roha Purnama Putri<sup>1</sup>, Alfariq Ramadani<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas maritim Raja Ali Haji, kepulauan Riau 29115, Indonesia  
Email : 2105010035@student.umrah.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pemerataan mutu pendidikan di daerah 3T. Sarana yang disediakan di daerah 3T haruslah memiliki mutu yang sama dengan sarana sekolah di daerah perkotaan. Penelitian ini menggunakan teori karakteristik kebijakan pendidikan dalam melihat kebijakan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara menjelaskan dan menjawab permasalahan secara lebih jelas. Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu. Lokasi penelitian berada di SMAN 6 Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa program untuk menjawab permasalahan peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T, salah satunya adalah Program Pendidikan Sarjana di Daerah 3T. Pemerintah seharusnya menyediakan pasokan listrik untuk SMAN 6 Batam. Selain itu memperluas jangkauan jaringan internet agar seluruh siswa dapat belajar dan menambah wawasan melalui referensi dari internet.

**Kata Kunci:** Implemnetasi, Kualitas Pendidikan, Kebijakan

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan modal utama dan terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya pendidikan, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang meningkat. Manfaat dari pendidikan tersebut, sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di alinea keempat. Pada UUD tersebut di dalamnya memiliki 4 tujuan dari terbentuknya negara Indonesia yaitu untuk melindungi seluruh bangsa dan suku yang ada di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pendidikan dapat mendorong potensi dari diri seseorang dan dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, kreatif dan cerdas. Tidak dipungkiri bahwa kualitas sumber daya manusia itu dipengaruhi oleh pendidikan. Pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan terhadap fungsi dari pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban dari bangsa yang bermartabat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi individu yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini instansi yang memiliki peranan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah sekolah, yang berasal dari lembaga pendidikan formal di jajaran kementerian pendidikan Nasional. Kegiatan yang dilakukan di sekolah adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar di luar kelas maupun di dalam kelas. Selain itu, dibuatlah sistem kurikulum sebagai bentuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Tentu saja fasilitas dan infrastruktur yang tersedia juga mendukung dalam proses belajar mengajar.

Namun, Sangat disayangkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia kurang baik. Menurut kepala BKKBN Hasto Wardoyo kualitas dari pendidikan yang ada di Indonesia kurang merata, hal ini dapat dilihat dari pendidikan terakhir yang dijalani oleh masyarakat Indonesia adalah tamatan dari SMP sebanyak 65% (Studi & Kuliah, 2023). Selain itu, pemerataan pendidikan di daerah 3T juga harus diperhatikan, karena daerah tersebut mengalami kemunduran dalam beberapa bidang dari daerah yang lain. Terutama dalam bidang pendidikan, penyebabnya terjadi karena letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga pendanaan dan pemerataan fasilitas terhambat disebabkan karena minimnya transportasi untuk menuju ke daerah 3T. Tidak hanya itu saja, kurangnya koordinasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, mengakibatkan pemerintah pusat

kurang memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Handoyo & Zulkarnaen, 2019) menyimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi kurangnya kualitas pendidikan dan ketidakmerataan pendidikan yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa, rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dan mahalnya biaya pendidikan. Tidak hanya itu saja, terdapat juga permasalahan-permasalahan dalam pendidikan yang ada di daerah 3T yaitu belum tersedianya layanan pendidikan di sebagian wilayah 3T, minimnya akses layanan pendidikan, minimnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, distribusi guru yang tidak seimbang, tidak sesuai antara kebutuhan dan penyediaan guru, angka partisipasi sekolah yang masih rendah, dan jumlah kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai.

Penerapan implementasi dapat dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan terhadap kemaslahatan publik atau masyarakat. Suatu kebijakan akan menunjukkan manfaatnya jika pemberlakuan kebijakan tersebut telah dilaksanakan. Implementasi merupakan bagian penting dari keseluruhan proses kebijakan atau regulasi. Lester dan Stewart (Nastia, 2014:201) menyatakan, “bahwa

implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Kemudian menurut Tachjan (Tahir, 2014:53), “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”. Menurut Subarsono (Subarsono, 2008) keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III (Subarsono, 2008:89- 104) menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, dan c) struktur birokrasi. Dalam hal ini peneliti kolaborasikan dengan dua variabel dari “Model Peningkatan Mutu Faktor Empat” yaitu kultur sekolah dan manajerial.

Menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 (Rozak, 2021) tentang sistem pendidikan nasional dan arah kebijakan pendidikan di Indonesia pertama, mengupayakan pemerataan dan perluasan dalam memperoleh pendidikan dengan mutu tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan meningkatkan anggaran

pendidikan secara berarti. Kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional. Serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, agar bekerja secara optimal dalam meningkatkan pendidikan watak dan Budi pekerti bertujuan untuk mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Ketiga, melakukan pemberdayaan pada lembaga pendidikan di sekolah dan di luar sekolah sebagai bentuk pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau keluarga melalui sarana dan prasarana yang memadai. Keempat, perbaharuan sistem pendidikan kurikulum berupa penyesuaian kurikulum yang berlaku di nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat dan pendidikan yang profesional. Kelima, memberikan pembaharuan dan pemantapan pada sistem pendidikan nasional dengan menggunakan prinsip otonomi keilmuan, manajemen dan desentralisasi. Keenam, kualitas dari lembaga pendidikan dari pemerintah maupun masyarakat harus ditingkatkan guna memberikan pendidikan yang efektif dan efisien sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan seni. Ketujuh, sumber daya manusia dikembangkan dengan terarah pada, terpadu dan menyeluruh melalui upaya reaktif dan proaktif agar generasi muda mampu berkembang secara optimal dibarengi oleh hak yang mendukung dan melindungi potensi dari generasi muda. Memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi guna memberikan peningkatan penguasaan dan pengembangan teknologi di bangsa sendiri dalam dunia usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh (Habsyi, 2020) dengan judul pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Nusantara Tauro. Adapun hasil dari penelitiannya berupa fasilitas penunjang belajar di SMA Nusantara Tauro memiliki kategori yang tinggi yaitu sebesar 33,34%, namun ada juga beberapa responden yang berpendapat fasilitas belajar di dalam kriteria rendah sebesar 27,27% dan prestasi belajar siswa cukup baik. Sehingga, hipotesis yang diberikan dinyatakan benar atau kesimpulan sementara yang dipaparkan yaitu adanya pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi siswa di SMA Nusantara Tauro dapat diterima dalam penelitian. Fasilitas yang tersedia di SMA Nusantara Tauro memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu 53,9%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putera & Rhussary, 2018) dengan judul peningkatan mutu pendidikan daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) di Kabupaten Mahakam Hulu. Hasil penelitiannya membahas tentang strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah pada kelas VI SDN 001 Ujoh Bilang, Kelas VII SMPN 1 Ujoh Bilang, dan kelas X SMUN 1 Ujoh Bilang. RPP dan LKS diuji oleh FKG 3T sebagai tolak ukur untuk menilai mutu pendidikan, SDN 001 Ujoh Bilang menggunakan metode

normative hasil yang didapat adalah RPP mendapatkan nilai 59 dengan kriteria sangat baik dan LKS mendapat nilai 78 dengan kriteria sangat baik jika ditotal mendapat nilai sebesar 137 dengan kriteria sangat baik. Uji coba di SMPN 1 Ujoh Bilang dengan menggunakan metode deskriptif hasil yang didapat adalah RPP memperoleh nilai sebesar 60 termasuk pada kriteria sangat baik dan LKS mendapat nilai 80 termasuk kriteria sangat baik. Selanjutnya adalah uji coba di SMUN 1 Ujoh Bilang menggunakan metode hermeneutis hasil yang didapat adalah RPP mendapatkan nilai sebesar 62 kriteria sangat baik dan LKS mendapatkan nilai sebesar 81 termasuk kriteria sangat baik. Faktor pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai di sebuah daerah terutama di daerah 3T dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah setidaknya setara dengan tingkat pendidikan di perkotaan. Selain itu, guru yang dapat mengajar dengan profesional dan memiliki metode pendidikan baru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga terciptalah standar kelulusan yang diperoleh maksimal.

Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan pemerataan pendidikan, dan untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam mengurangi permasalahan di daerah 3T. Judul penelitian penulis adalah Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu

Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam.

### STUDI KEPUSTAKAAN

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faisal Y. Habsyi tahun 2020 dengan judul pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Nusantara Tauro. Adapun hasil dari penelitiannya berupa fasilitas penunjang belajar di SMA Nusantara Tauro memiliki kategori yang tinggi yaitu sebesar 33,34%, namun ada juga beberapa responden yang berpendapat fasilitas belajar di dalam kriteria rendah sebesar 27,27% dan prestasi belajar siswa cukup baik. Sehingga, hipotesis yang diberikan dinyatakan benar atau kesimpulan sementara yang dipaparkan yaitu adanya pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi siswa di SMA Nusantara Tauro dapat diterima dalam penelitian. Fasilitas yang tersedia di SMA Nusantara Tauro memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu 53,9%.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tommy Fimi Putera dan Margaertha Lassni Rhussary dengan judul peningkatan mutu pendidikan daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) di Kabupaten Mahakam Hulu. Hasil penelitiannya membahas tentang strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah pada kelas VI SDN 001 Ujoh Bilang, Kelas VII SMPN 1 Ujoh Bilang, dan kelas X SMUN 1 Ujoh Bilang. RPP dan LKS diuji oleh FKG 3T sebagai tolak ukur untuk menilai mutu pendidikan, SDN 001 Ujoh Bilang menggunakan metode normative hasil yang didapat adalah RPP mendapatkan nilai 59 dengan kriteria sangat baik dan LKS mendapat nilai 78 dengan kriteria sangat baik jika ditotal mendapat nilai sebesar 137 dengan kriteria sangat baik. Uji coba di SMPN 1 Ujoh Bilang dengan menggunakan

metode deskriptif hasil yang didapat adalah RPP memperoleh nilai sebesar 60 termasuk pada kriteria sangat baik dan LKS mendapat nilai 80 termasuk kriteria sangat baik. Selanjutnya adalah uji coba di SMUN 1 Ujoh Bilang menggunakan metode hermeneutis hasil yang didapat adalah RPP mendapatkan nilai sebesar 62 kriteria sangat baik dan LKS mendapatkan nilai sebesar 81 termasuk kriteria sangat baik. Faktor pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai di sebuah daerah terutama di daerah 3T dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah setidaknya setara dengan tingkat pendidikan di perkotaan. Selain itu, guru yang dapat mengajar dengan profesional dan memiliki metode pendidikan baru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga terciptalah standar kelulusan yang diperoleh maksimal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Sunadi dengan judul pengaruh motivasi belajar dan pemanfaatan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Hasil dari penelitiannya adalah adanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa di mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Dalam hal ini motivasi belajar menunjukkan pengaruh positif terhadap prestasi siswa. Namun tidak ada pengaruh secara parsial terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh fasilitas belajar. Hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor-faktor yang lebih dominan dibandingkan fasilitas yang tersedia seperti gaya belajar, perhatian orang tua, kebiasaan belajar, minat baca, dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan suatu fenomena atau peristiwa yang telah ditentukan dalam penelitian. Gambaran dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam mengurangi permasalahan di daerah 3T. Pada metode penelitian kualitatif ini tidak menggunakan perhitungan atau statistika dalam menyelesaikan suatu fenomena atau peristiwa yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini penelitian menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lebih jelas dan terperinci. Tempat pada penelitian ini adalah di SMA negeri 6 Batam tepatnya di pulau Air Raja, tahun 2023. Narasumber dari penelitian ini adalah siswa dan guru. Menggunakan survei, observasi dan studi literatur dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dari fenomena atau peristiwa yang menjadi permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Fasilitas dan Motivasi Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa

Dilihat dari lingkungan sekolah dan fasilitas yang tersedia di sekolah SMAN 6 Batam dapat dikatakan sudah baik. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia berada pada kondisi terawat, dan memenuhi sebagai penunjang prestasi akademisi dan non akademis murid. Para guru menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi prestasi siswa. Artinya, para guru sangat berkontribusi

terhadap peningkatan prestasi siswa. Kondisi lingkungan yang baik, juga dapat meningkatkan prestasi siswa. Lingkungan menjadi faktor terpenting dalam mempengaruhi perkembangan karakter siswa. Bila siswa berada pada lingkungan yang kondusif seperti lingkungan yang aman, nyaman, dan taat peraturan. Siswa tersebut memiliki karakter yang positif. Begitu juga sebaliknya bila siswa berada di lingkungan yang tidak kondusif, maka karakternya lebih ke arah negatif. SMAN 6 Batam, dapat dinyatakan memiliki lingkungan positif dan peraturan, untuk mendukung terbentuknya lingkungan yang aman dan nyaman. Berdasarkan data dari survei lingkungan belajar dan peraturan di SMAN 6 Batam dinilai baik bagi siswanya. Selain itu, analisis data dari survei para guru yang telah dilakukan. Fasilitas yang menjadi rekomendasi untuk siswa dalam menambah pengetahuan atau wawasan akademiknya adalah perpustakaan. Menurut beberapa narasumber, perpustakaan menjadi penunjang tambahan kompetensi dasar pengetahuan murid. Terdapat juga kegiatan olahraga dan kesenian sebagai ekstrakurikuler yang diberikan sekolah kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Selain itu, informasi-informasi seputar beasiswa sangat terbuka, bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi-informasi ini diberikan oleh masyarakat, dokter, kepala sekolah (PIP), dan Humas. Tentu saja informasi-informasi terkait beasiswa sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa SMAN 6 Batam, mendukung dan memperhatikan siswanya dengan baik.

Dalam hal efektivitas pemberian dana BOS telah tepat sasaran atau belum. Menurut beberapa narasumber dana BOS

sudah tepat sasaran karena sudah memenuhi kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan di SMAN 6 Batam. Tetapi, terdapat narasumber yang berpendapat bahwa dana BOS belum tepat sasaran, sehingga diharapkan dana BOS yang diberikan mampu meningkatkan kondisi sekolah, tenaga pendidik dan murid untuk mewujudkan sekolah yang diinginkan. Permasalahan para guru yang ditemukan saat melakukan survei di SMAN 6 Batam seperti:

- 1) Transportasi menuju sekolah. Berdasarkan survei permasalahan yang dihadapi adalah cuaca dan kondisi laut. Para guru kebanyakan menuju ke kesekolah menggunakan perahu/kapal. Sehingga, bila cuaca sedang buruk atau kondisi ombak yang tinggi menjadi halangan untuk menuju ke kesekolah tepat waktu.
  - 2) Fasilitas dalam bentuk barang/produk yang dibeli sekolah tidak dapat digunakan dalam waktu lama. Oleh karena itu, perlu adanya fasilitas baru untuk mengeksplorasi potensi siswa.
  - 3) Ketersediaan jaringan di sekolah belum merata.
  - 4) Permasalahan listrik.
2. Kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan yang ditawarkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai bentuk upaya dalam mempercepat pemerataan dan pembangunan mutu pendidikan daerah 3T, melalui program yang diberi nama Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia. Menurut (Tagela, 2022) rancangan-rancangan program yang akan dibuat sebagai berikut:

- 1) program pendidikan profesi guru terintegrasi dengan kewenangan tambahan (PPGT).
- 2) Program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM-3T).
- 3) Program pendidikan profesi guru terintegrasi kolaboratif (PPGT Kolaboratif).

Program seperti Sarjana Mendidik di daerah 3T berfokus kepada para sarjana yang belum berprofesi/calon sebagai guru. Nantinya, para sarjana ini akan ditugaskan di daerah 3T selama satu tahun. Hal ini dimaksud untuk mengatasi kurangnya tenaga pendidik, sekaligus sebagai latihan bagi para calon guru untuk melatih dirinya dan mempersiapkan tenaga pendidik yang profesional, tangguh, mandiri, dan peduli satu sama lain. Selain itu, para calon ini dituntut untuk memiliki jiwa kebangsaan sehingga dalam melakukan pendidikan mereka memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dan dapat mewujudkan cita-cita yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Adapun tujuan dari program sarjana mendidik di daerah 3T ialah sebagai berikut:

- 1) Memberikan bantuan kepada daerah untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan tenaga pendidik.
- 2) Memberikan pengalaman kepada calon guru.
- 3) Menumbuhkan jiwa saling tolong menolong dan terpanggil untuk mengabdikan dirinya di daerah 3T.
- 4) Sebagai ajang persiapan bagi calon guru untuk menuju ke program pendidikan profesi guru.

### 3. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pada bab VII yang membahas standar sarana dan prasarana, pada pasal 42 menegaskan bahwa:

- 1) Setiap satuan pendidik wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendididkan ruang tata usaha, ruang perpustakaan tema, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

### 4. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu adalah keseluruhan deskripsi dan karakteristik dari suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, konsep mutu dapat dilihat dari input, proses dan output. Menurut Philp B. Crosby, kualitas atau mutu adalah kesesuaian dengan persyaratan, yaitu sesuai dengan apa yang tersirat atau yang dibakukan. Suatu produk dikatakan

memenuhi syarat jika memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Standar kualitas tersebut meliputi bahan baku, proses manufaktur, dan proses finishing. Untuk menghadapi tantangan nasional dan internasional, perlu dibangun pendidikan yang berkualitas. Dimana pendidikan yang berkualitas menjadi kunci untuk membangun manusia yang berkompeten dan beradab dalam arti menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. Persepsi terhadap mutu pendidikan akhir-akhir ini semakin meningkat, terlihat dari keseriusan berbagai lembaga pendidikan dalam meningkatkan daya saing, efisiensi, pelayanan dan transparansi. Oleh karena itu tidak heran jika peningkatan mutu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan. Padahal pendidikan nasional Indonesia masih belum memenuhi harapan peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat dan pemerintah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari segi kuantitas mengacu pada sejauh mana suatu program pendidikan dapat mencapai tujuannya, sedangkan dari segi kualitas mengacu pada nilai suatu produk yang diciptakan. Secara kuantitas, jumlah anak yang bersekolah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, namun kualitas pendidikan di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan dunia. Dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini adalah kualitas moral bangsa Indonesia yang semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari anarki para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya, serta maraknya kejahatan yang terjadi. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan merupakan program penting pemerintah (Kemendikbud), dan telah banyak terobosan dan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan yang

bermutu dan merata. Salah satu program pemerintah kota Batam adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan dana BOSP.

#### 5. Upaya yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah

Adapun strategi-strategi yang ditawarkan oleh dinas Pendidikan kota Batam untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan pemerataan pendidikan (Renja disdik, 2023) sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit Satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
- 2) Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka Menambah daya tampung pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
- 3) Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program Pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- 4) Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan Tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
- 5) Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik Melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan;
- 6) Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan Prestasi pada semua jenjang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pemerintah kota Batam, telah melakukan berbagai macam cara untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan pemerataan mutu pendidikan di daerah 3T. Pemerintah melalui Kemendikbud menawarkan solusi dalam mengatasi

permasalahan pemerataan pendidikan salah satunya dengan melakukan program Sarjana Mendidik di Daerah 3T yang dimaksud untuk memberikan bantuan tenaga pendidik di daerah tersebut. Juga, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kota Batam menawarkan beberapa strategi yang telah dicantumkan pada Renja disdik untuk meminimalisir atau mengurangi permasalahan-permasalahan pendidikan. Pertama, melakukan peningkatan daya tampung kepada pendidikan dasar dan pendidikan usia dini. Kedua, membuat ruang kelas baru. Ketiga, pemenuhan sarana penunjang pendidikan. Keempat, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Kelima, meningkatkan program beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu dan berprestasi disegala jenjang.

Hasil dari survei yang dilakukan, dinilai sangat baik. Fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang mutu pendidikan di SMAN 6 berada pada kondisi yang baik, sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga berkontribusi besar dalam memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan biaya siswa bagi siswa yang akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

### Saran

Permasalahan yang terjadi pada SMAN 1 adalah transportasi menuju sekolah yang memiliki kendala dengan cuaca dan kondisi laut. Fasilitas yang diberikan tidak bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ketersediaan jaringan internet juga tidak merata dan terdapat permasalahan listrik di SMAN 6 Batam. Sebaiknya, Pemerintah setempat bertindak untuk melakukan penyuplaian tenaga listrik di SMAN 6 Batam. Selain itu, memperluas jangkauan jaringan internet agar semua siswa dapat belajar dan menambah wawasan melalui

referensi-referensi dari internet.

## REFERENSI

### Journal:

Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, Vol. 4 no. 1.

Habsyi, F. Y. (2020). Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Nusantara Tauro. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 2(1), 13–22.

Handoyo, A. D., & Zulkarnaen. (2019). Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 21–24.  
<https://bimawa.uad.ac.id/wp-content/uploads/Paper-Seminar-Nasional-2.pdf>

Putera, M. T., & Rhussary, M. L. (2018). (Terdepan , Terpencil Dan Tertinggal ) Di Kabupaten. *Ekonomi Dan Manajemen*, 12, 144–148.  
<https://journals.umkt.ac.id/index.php/JEM/article/view/119>

Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.

Studi, K. R., & Kuliah, M. (2023). *UIN Raden Mas Said Surakarta*.

Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tagela, U. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN, PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T KABUPATEN SUMBA TENGAH. *NURINA WIDYA: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 111–118.

Widiyastuti, I. (2016). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Vol. V.

Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Cendekia*, Vol. 15 No. 1.